

DARI JAKARTA MENJERAT  
SJAMSUL NURSALIM

SIAPA PENEMBAK  
KORBAN AMUK MASSA?

# TEMPO

ENAK DIBACA DAN PERLU

*inilah*

## TIM MAWAR DAN RUSUH SARINAH

Polisi menengarai keterlibatan penculik aktivis 1998  
dalam huru-hara 22 Mei lalu. Kesaksian pelaku lapangan.

10-16 JUNI 2019  
RP 45.000  
www.tempo.co.id  
PUBLISHED BY PT TEMPO PUBLISHING  
KORAN, JALAN KEMANGKARAN 101, JAKARTA 10140



Edisi senin, 10 juni 2019

# Bau Mawar di Jalan Thamrin

majalah.tempo.co



DAHLIA Zein baru selesai melahap makanannya di sebuah restoran Padang di perempatan Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, saat telepon selulernya berdering, Rabu malam, 22 Mei lalu. Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya, organisasi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, tersebut mendapat laporan dari anak buahnya soal kisruh dalam unjuk rasa di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jalan M.H. Thamrin, yang berjarak sekitar 300 meter dari posisi Dahlia. “Saya bilang, ‘Ya udah, benturin aja. Chaos-in aja sekalian,’” ujar Dahlia kepada Tempo di sebuah kafe di pusat belanja Cilandak Town Square, Sabtu, 1 Juni lalu.

Dahlia mengaku kesal karena polisi menyuruh pengunjuk rasa pulang setelah mereka berbuka puasa. Menurut dia, sejumlah anggota Baladhika dari berbagai daerah ikut berunjuk rasa mempersoalkan dugaan kecurangan dalam pemilu presiden. Membantah mengerahkan massa pengunjuk rasa ke Bawaslu, Dahlia mengatakan anak buahnya datang atas inisiatif sendiri.

Tak lama setelah percakapan itu, kericuhan terjadi di Jalan Wahid Hasyim, seberang gedung Bawaslu. “Setelah makan, saya melihat sendiri polisi membubarkan pakai gas air mata,” kata Dahlia. Tempo, yang berada di antara massa pengunjuk rasa, menyaksikan mereka membalas tembakan gas air mata dengan melemparkan batu dan petasan ke arah polisi. Malam sebelumnya, setelah polisi memukul mundur massa di depan gedung

Bawaslu ke kawasan Tanah Abang, kericuhan juga terjadi dan merembet ke arah Petamburan, Jakarta Pusat. Seusai huru-hara, diketahui bahwa 8 orang tewas dan 700-an jiwa luka-luka.





Fauka Noor Farid. medanheadlines.com

Tempo membaca transkrip pembicaraan yang diduga antara Dahlia dan Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai Gerakan Indonesia Raya Fauka Noor Farid melalui ponsel saat kerusuhan 22 Mei lalu. Fauka adalah anak buah Prabowo di Komando Pasukan Khusus. Ia anggota Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis pada 1998 dan divonis 16 bulan penjara. Fauka pensiun dini dengan pangkat letnan kolonel, lalu membantu kemenangan Prabowo pada pemilihan presiden 2014 dan 2019.

Dalam transkrip yang diperlihatkan polisi itu disebutkan bahwa Dahlia melaporkan kericuhan yang terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi. Tertulis juga di situ bahwa Fauka menyatakan berada di sekitar gedung Bawaslu. Menurut transkrip tersebut, Fauka menyatakan bagus jika terjadi chaos, apalagi jika ada korban jiwa. Masih menurut transkrip yang sama, Fauka disebut meminta Dahlia mencarikan kamar untuknya di kawasan Cikini. Dua petinggi badan intelijen dan tiga penegak hukum yang ditemui Tempo membenarkan isi transkrip tersebut. Dua hamba wet menyatakan keberadaan Fauka di kawasan Sarinah, persis di seberang gedung Bawaslu.

Dahlia mengakui nomor telepon 0816-17XX-XXXX yang tertulis dalam transkrip tersebut sebagai miliknya. Nomor telepon Fauka juga sama dengan yang tertulis di situ. Tapi Dahlia dan Fauka membantah isi percakapan tersebut. Keduanya juga menyatakan tak saling berkomunikasi selama unjuk rasa.

Meski mengaku memerintahkan anak buahnya melawan, Dahlia mengatakan tak ingin ada korban jiwa dalam demonstrasi tersebut. Menurut dia, polisi seharusnya tidak membubarkan pengunjuk rasa yang baru selesai berbuka puasa. Dahlia membenarkan memesan kamar hotel di kawasan Cikini dan Tanah Abang. "Bukan untuk Fauka, tapi buat anak buah saya yang datang dari daerah,"

ujar Dahlia, yang mengaku dekat dengan Prabowo dan menjadi salah satu pengacara mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.

Adapun Fauka membantah berada di dekat gedung Bawaslu saat unjuk rasa 22 Mei lalu. Menolak menyebutkan posisinya saat kericuhan terjadi, lulusan Akademi Militer tahun 1992 itu mengaku sedang berjumpa dengan teman satu angkatannya yang bertugas di Pasukan Pengamanan Presiden. “Saya jauh dari Bawaslu,” katanya melalui telepon, Sabtu, 1 Juni lalu. Ia juga membantah jika disebut menginginkan ada korban jiwa dalam demonstrasi itu. “Instruksi dari Pak Prabowo jelas: unjuk rasa harus damai dan tak boleh anarkistis.”

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak, yang satu angkatan dengan Fauka di Akademi Militer, mengatakan sejak siang dia bersama Presiden Joko Widodo. “Tidak ada lagi teman satu angkatan saya di Paspampres,” ujar Maruli.

• • •

DUGAAN keterlibatan orang di sekitar Prabowo Subianto dalam unjuk rasa bukannya tak dicium pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat, 17 Mei lalu, mengatakan pemerintah sudah mendeteksi adanya gerakan tersebut. “Banyak orang mengkhawatirkan lingkungan Pak Prabowo. Lebih mengkhawatirkan lagi kalau orang-orang di lingkungannya bergerak tanpa setahu beliau,” ujar mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia tersebut.

Sehari sebelum kericuhan, polisi menahan mantan Komandan Jenderal Kopassus, Soenarko. Awalnya dilaporkan karena dugaan makar, Soenarko menjadi tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal. Akhir Mei lalu, polisi juga menahan Kivlan Zen karena kasus makar. Kivlan, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, dituding mendanai rencana pembunuhan empat pejabat negara. Soenarko dan Kivlan diketahui sebagai pendukung Prabowo.

Ihwal dugaan keterlibatan Fauka, dua sumber di Badan Pemenangan Nasional PrabowoSandi bercerita bahwa ia ikut merancang demonstrasi di Bawaslu beberapa pekan sebelumnya. Menurut keduanya, ada sejumlah pertemuan membahas rencana aksi massa tersebut, antara lain di kantor BPN di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh loyalis Prabowo, petinggi Partai Gerindra, dan beberapa ulama dari berbagai daerah.



Kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. ANTARA/Nova Wahyudi

Menurut sumber yang sama, rapat perencanaan serupa diselenggarakan di sebuah hotel di sekitar Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tertutup yang juga dihadiri oleh Fauka itu diikuti sejumlah pemuka agama dari Jawa Timur. Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul delapan malam hingga dinihari, peserta rapat tak boleh membawa ponsel. Fauka membantah ikut merencanakan unjuk rasa. “Tidak ada pertemuan itu,” ucapnya.

Penelusuran Tempo menemukan bahwa sejumlah personel Garda Prabowo, organisasi yang didirikan dan dipimpin Fauka, terlibat dalam demonstrasi tersebut. Salah satunya Abdul Gani Ngabalin, yang memiliki beberapa nama alias, seperti Mamat, Kobra Hercules, dan Kobra 08--angka ini merujuk pada panggilan Prabowo saat berdinasi di TNI. Abdul Gani adalah bekas anak buah Rozario Marshal alias Hercules, preman Tanah Abang. Gani kini ditahan di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya karena diduga terlibat dalam kerusuhan di sekitar Bawaslu.

Sejumlah sumber di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengatakan Abdul Gani menjabat Panglima Garda Prabowo. Beberapa hari sebelum unjuk rasa, ia ditengarai diperintahkan Fauka bersiap-siap mengikuti demonstrasi, yang kemudian berujung ricuh. Sebelumnya, setelah pencoblosan 17 April lalu, ia diminta menjaga rumah Prabowo di Jalan Kertanegara. Menjelang 22 Mei, Abdul Gani diduga ikut mengerahkan massa dari berbagai daerah, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku.

Sebagian diinapkan di daerah sekitar Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Endun, pengunjuk rasa yang beberapa kali mengikuti kegiatan Garda Prabowo di Jalan Kertanegara, menyaksikan Jalan Kertanegara dipenuhi ratusan pengunjuk rasa yang diangkut dengan sejumlah mobil pada 20 Mei lalu. Pria 39 tahun asal Majalengka, Jawa Barat, itu ditahan pada 21 Mei menjelang tengah malam di seberang gedung Bawaslu.

Melalui seorang kenalannya, Tempo menemui Endun di Polda Metro Jaya sehari setelah Lebaran. Mandor bangunan yang mengagumi Prabowo itu mengaku tertarik bergabung dalam kegiatan Garda Prabowo karena dijanjikan bakal menjadi petugas pengamanan pasangan nomor urut 02 tersebut jika mereka memenangi pemilu.

Menurut Endun, Garda Prabowo kerap mengadakan pertemuan di sebuah tenda di dekat rumah Prabowo. Suatu kali anak buah Abdul Gani bernama Ripai memperkenalkan bosnya itu di hadapan anggota organisasi sebagai “Panglima Garda Prabowo”. “Dia yang memimpin dan menggerakkan massa di lapangan,” kata Endun menirukan ucapan Ripai kala itu. Ditunjukkan foto Fauka Noor Farid, Endun mengaku sering melihatnya di Kertanegara. Tapi Endun menyatakan tak pernah melihat Fauka berhubungan langsung dengan personel Garda Prabowo.

Peran Abdul Gani tak hanya sampai di situ. Tempo membaca salinan percakapan di grup WhatsApp “Garda Prabowo” yang beranggotakan sekitar 30 orang. Abdul Gani--dengan nama “Oppocobra08”--tercatat sebagai admin grup tersebut. Salah satu percakapan di grup itu terkait dengan rencana people power atau pengerahan massa “skala lokal dan nasional” dengan melibatkan berbagai komponen, seperti organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan organisasi buruh, menjelang pengumuman hasil pemilu presiden.

Dalam salinan itu disebutkan, jika Komisi Pemilihan Umum tak menyatakan Prabowo-Sandi sebagai pemenang, massa akan menduduki gedung KPU, Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Istana Negara supaya keputusan berubah. Tapi, jika KPU tak mengubah keputusan tersebut, pengunjuk rasa akan terus menduduki Istana hingga Jokowi lengser.

Abdul Gani kerap mengirimkan pesan berisi soal tudingan kecurangan oleh kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ia pun kerap membakar semangat anggota grup dengan mengunggah kalimat seperti “hidup mulia atau mati syahid” atau “people power spektakuler”. Ditunjukkan isi percakapan itu, Endun--yang mengaku menjadi anggota grup tersebut-- membenarkannya.

Menurut Endun, personel Garda Prabowo berkumpul pada 21 Mei sore di Bundaran Hotel Indonesia. Di situ, ia berjumpa dengan Ripai dan diperintahkan bergerak ke arah gedung Bawaslu, bergabung dengan pengunjuk rasa lain. Saat itu, demonstrasi berjalan cukup tertib. Endun menyaksikan, sekitar pukul sepuluh malam, massa mulai meninggalkan kawasan Bawaslu.

Namun, tak lama kemudian, massa lain mulai berdatangan. Kericuhan mulai timbul. Endun menyaksikan massa mulai merusak penghalang di depan gedung Bawaslu. Saat



itulah, kata Endun, Ripai berteriak, “Lawan polisi! Serang!” Endun mengaku ikut meneriakkan takbir. Setelah itu, ia tak melihat lagi sosok Ripai. Tiba-tiba saja dia menghilang. Sedangkan Endun ditangkap polisi. “Saya hanya korban,” ujar lulusan sekolah menengah pertama ini.

Dimintai tanggapan, Ripai awalnya membantah tergabung dalam grup WhatsApp “Garda Prabowo” dan mengikuti unjuk rasa di Bawaslu. Tak berapa lama, laki-laki asal Ternate, Maluku Utara, itu menelepon dan membenarkan ikut berdemonstrasi. Tapi bukan pada 21 Mei seperti disebutkan Endun. “Hari itu saya berjaga di rumah Prabowo. Saya baru ke Bawaslu tanggal 22 Mei,” ucapnya. Ripai menyangkal ikut meneriakkan perlawanan terhadap polisi.

Hari itu Abdul Gani Ngabalin juga ikut berunjuk rasa. Dua jam sebelum azan magrib, pesan pendek beredar ke ponsel sejumlah penggerak massa. Tempo membaca pesan pendek tersebut pada pekan lalu. Isinya soal rencana kerusuhan yang akan dimulai pada pukul 19.15 WIB. Tertulis dalam pesan itu bahwa kerusuhan menunggu perintah dari Garda Prabowo. Tak berbeda jauh dari waktu yang disebutkan dalam pesan pendek itu, kerusuhan pun pecah. Tak lama berselang, Abdul Gani mendapat perintah dari Fauka Noor Farid untuk menghapus seluruh percakapan mereka di WhatsApp.



Abdul Gani Ngabalin alias Kobra. Youtube

Malam itu juga polisi menangkap Abdul Gani, yang diduga terlibat kericuhan. Hasil tes urine menunjukkan dia menggunakan narkotik jenis sabu. Tempo mencoba menemui Abdul Gani alias Kobra Hercules yang ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Tapi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan Kobra tak bisa ditemui. “Tidak boleh. Masih dalam pemeriksaan,” ujarnya.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengaku tak mengetahui ihwal rapat perencanaan unjuk rasa. Ia juga tak mengetahui peran Abdul Gani dalam kerusuhan tersebut. Menurut politikus Gerindra ini, Garda Prabowo juga bukan organisasi resmi partainya. “Itu relawan saja,” katanya.

Fauka Noor Farid mengaku mengenal Abdul Gani Ngabalin. Tapi ia membantah memiliki kedekatan dengan pria asal Pulau Kei, Maluku, tersebut. Fauka pun menyangkal memerintahkan Abdul Gani ikut berunjuk rasa atau menghapus isi percakapan mereka. Dia juga menyangkal jika Kobra disebut menjadi panglima, bahkan anggota Garda Prabowo. “Saya kan Ketua Umum Garda Prabowo. Kalau secara resmi mau masuk, kan harus ada surat. (Untuk Abdul Gani) itu tidak ada,” ujarnya (baca: “Wawancara Fauka Noor Farid”).

Anak buah Abdul Gani, Ripai, justru mengatakan bosnya itu dekat dengan Fauka. Ripai menyaksikan, beberapa hari sebelum unjuk rasa berlangsung, di sebuah lapangan di kawasan Cijantung, Fauka memberikan seragam loreng kepada Gani. Seragam resmi Garda Prabowo itu kemudian diberikan Gani kepada Ripai. “Dia Panglima Garda Prabowo,” kata Ripai.

STEFANUS PRAMONO, RAYMUNDUS RIKANG



# Tim Mawar Selalu Dikaitkan dengan Kerusuhan

[majalah.tempo.co](http://majalah.tempo.co)



PENSIUN dini sebagai letnan kolonel, Fauka Noor Farid ikut berupaya memenangkan Prabowo Subianto pada 2014 dan 2019. Kiprahnya seperti tak pernah lepas dari komandannya di Komando Pasukan Khusus tersebut. Bekas anggota Tim Mawar, kelompok penculik aktivis pada 1997-1998, itu dituding sebagai salah satu dalang kerusuhan unjuk rasa pada 21-22 Mei lalu. Melalui telepon Dahlia Zein, advokat yang juga pendukung Prabowo, Sabtu, 1 Juni lalu, Tempo mewawancarai Fauka.

Anda disebut-sebut sebagai salah satu dalang kerusuhan....

Itu kan perlu bukti. Tuduhan itu seperti frame yang dibuat pihak sebelah, atau siapa punlah, dengan orang-orang yang dituduh semuanya ada di pihak 02 (Prabowo-Sandi). Ini cerita yang dikarang-karang.

Informasi yang kami dapatkan, Anda ada di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu pada 22 Mei dan memberi instruksi supaya terjadi kerusuhan....

Malam itu saya janji dengan teman saya, satu angkatan di Paspampres. Lucu kalau muncul nama saya sebagai dalang kerusuhan. Saya selalu meneriakkan kepada orang-orang saya supaya aksi tetap damai. Instruksi dari beliau (Prabowo) pun damai. Jangan berbuat anarkistis.

(Komandan Pasukan Pengamanan Presiden yang juga satu angkatan dengan Fauka, Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan pada hari itu dia tak bertemu dengan Fauka. Menurut Maruli, sejak siang dia mendampingi Presiden.)

Anda merekrut kelompok Abdul Gani alias Kobra Hercules untuk berunjuk rasa?

Kurang kerjaan. Saya tahu Kobra, tapi kenalnya juga baru saja. Saya sering ketemu dia di Kertanegara. Tapi saya tidak pernah memerintahkan penggalangan massa ke Bawaslu. Kalau dia menggalang sendiri, itu di luar kewenangan saya.

Kobra disebut-sebut sebagai Panglima Garda Prabowo....

Saya ini Ketua Umum Garda Prabowo. Kalau mau jadi anggota, silakan. Tapi kan harus ada surat. (Kobra) Tidak punya surat. Inilah.... Saya kadang malas berteman dengan orang lain karena yang saya ajak berteman itu kadang euforia kebanggaannya terlalu tinggi. Seperti Kobra, ke mana-mana ngomong ini-itu. Kobra itu menganggap diri sendiri pemimpin. Padahal yang dia omongkan belum tentu datang dari saya.

Anda juga disebut ikut menggelar rapat perencanaan unjuk rasa....

Saya tidak tahu ada pertemuan itu, dan saya tidak pernah mau ikut. Saya tahu porsi saya.

Apa porsi Anda?

Seperti sekarang, saya dikait-kaitkan dengan kerusuhan. Saya Tim Mawar. Siapa tidak kenal dengan Tim Mawar? Tidak hadir dalam itu pun saya sudah diisukan itu. Yang rugi siapa kalau saya dikaitkan? Beliau (Prabowo), kan?

Anda merasa status sebagai anggota Tim Mawar melekat dengan tuduhan?

Ini kan sudah di-framing. Di kubu 02 ada saya, Pak Chairawan (Mayor Jenderal Purnawirawan Chairawan Kadarsyah Nusyirwan, pemimpin Tim Mawar). Segala kerusuhan dikaitkan dengan kami, diarahkan ke makar. Polisi seperti meng-arahkan ke sana. Polisi sekarang yang pen-ting tangkap dulu, setelah itu baru dicarikan pasalnya.

Anda tidak takut ditangkap?

Ha-ha-ha.... Saya tidak salah. Saya tidak pernah memerintahkan orang untuk rusuh. Saya tidak pernah menggerakkan orang lain untuk melanggar hukum. Kalau saya dituduh, pasti akan melawan, dong. Tidak mungkin saya akan diam. Ibarat semut diinjak, pasti melawan.

Seperti apa Anda akan melawan?

Ya, tidak tahu. Ha-ha-ha.... Jujur saja, begitu di media sosial tersebar saya terlibat, banyak anak buah saya, mantan prajurit saya, datang ke rumah atau menelepon. Saya tenangkan mereka. Tapi, kalau anak buah saya membela komandannya yang dizalimi, itu hak mereka.

Anda sangat dekat dengan Prabowo?

Semua mantan anak buah Pak Prabowo pasti dekatlah. Yang tidak pernah dipimpin juga merasa dekat. Makanya di kompleks Kopassus dia menang, di kompleks Paspampres menang. Berarti kan semua merasa prajurit Prabowo.

Sebagai pendukung Prabowo, Anda sebenarnya menginginkan akhir seperti apa?

Pemerintah seharusnya jujur saja. Coba itu, petugas KPPS yang meninggal diautopsi. Kecurangan itu fakta. Jangan kalah dibuat menang.

Anda meyakini Prabowo seharusnya dilantik?

Kalau yakin menang, saya yakin beliau yang menang. Kalau dilantik atau tidak, kita serahkan kepada Yang Mahakuasa. Ha-ha-ha....

# Bedil Rongsok dan Target-Targetnya majalah.tempo.co

[majalah.tempo.co](http://majalah.tempo.co)



SEMBARI menyantap nasi berlauk rendang, Kivlan Zen membuka percakapannya dengan Iwan Kurniawan di Restoran Sederhana di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada awal Maret lalu. Tak berpanjang-lebar, Kivlan menyuruh Iwan mencari senjata laras panjang dan pendek, masing-masing dua pucuk, untuk menembak mati Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto serta Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar -Pandjaitan. “Mereka sudah merepotkan kita dan mengkhianati tentara,” ujar Iwan menirukan Kivlan dalam wawancara dengan Tempo pada Selasa, 28 Mei lalu.

Mendengar nama dua jenderal purnawirawan itu, Iwan terperanjat karena target yang diincar dibunuh sebelum pertemuan di Sederhana adalah seorang pendengung alias buzzer Joko Widodo, yang juga diorder Kivlan. Iwan mulanya sangsi. Tapi keraguan tersebut sirna tatkala bekas komandannya itu menyorongkan pecahan Sin\$ 1.000 sebanyak 15 lembar. “Saya anggap dia serius karena kasih duit,” kata Iwan. Dolar itu langsung ditukar dengan rupiah sekitar Rp 150 juta di gerai money changer yang berjarak sekitar 200 meter dari Sederhana.

Iwan mengenal Kivlan karena pernah menjadi bawahannya semasa pensiunan jenderal bintang dua itu menjabat Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat.

Setelah tak lagi menjadi tentara karena desersi pada 2005, Iwan mendirikan organisasi Trisula Macan Putih, kelompok pendukung Prabowo Subianto. Di sana, Kivlan didapuk sebagai pembina.

Kepada Tempo, Iwan mengaku tak gentar membunuh orang. Sebagai bekas prajurit, pria 49 tahun itu mengklaim pernah ikut sejumlah operasi, dari Timor Timur, Aceh, hingga Papua. Ia menghitung telah menewaskan sedikitnya empat orang dengan senapannya dalam operasi tersebut.

Berbekal duit pemberian Kivlan, Iwan mulai berburu senjata. Seseorang bernama Adnil menawarkan tiga senjata: Mayer, rakitan laras pendek, dan rakitan laras panjang. Masingmasing sepucuk dengan kaliber 22. Tak dilengkapi surat-surat, ketiga senjata tersebut ditebus Rp 35 juta. “Adnil tahu saya mantan tentara yang mungkin suka senjata,” ujar Iwan.

Pembelian dari Adnil melengkapi ko--leksi Iwan yang sudah menyimpan sepucuk revolver Taurus kaliber 38 dari Asmaizul alias Fi , Ketua Gerakan Emak-emak Peduli Rakyat, organisasi “relawan” Prabowo. Iwan dan Asmaizul saling kenal karena sama-sama aktif sebagai pendukung kubu 02. Menurut Iwan, pistol itu merupakan jaminan karena Fi pernah meminjam Rp 50 juta pada Oktober 2018 atau tujuh bulan sebelum kerusuhan pada 21-22 Mei lalu.

Anak Asmaizul , Bayu Putra Har anto, mengatakan revolver tersebut peninggalan ayahnya dan digadaikan ibunya kepada Iwan. Versi Bayu, ibunya meminjam uang kepada Iwan pada 2016. “Ibu butuh uang untuk mempertahankan gedung Cawang Kencana,” ucap Bayu. Saat itu, suaminya, Moerwanto Soeprapto, purnawirawan jenderal bintang dua yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, sedang bersengketa soal pengelolaan Cawang Kencana. Fi membutuhkan duit untuk mengurus kasus itu dan membayar biaya operasional gedung, seperti kebersihan dan listrik. Tapi, menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, Asmaizul menjual senjata ilegal kepada Iwan.

Sebelum mendapatkan senjata dari Adnil, Iwan bertemu dengan politikus Partai

Persatuan Pembangunan, Habil Marati. Mereka dua kali bertemu pada akhir Maret lalu di restoran Saigon Delight di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Iwan mengajak Tajudin, sopirnya yang juga desertir, dan Azwarmi, sopir Kivlan. Adapun Habil ditemani istrinya. Kepada Iwan, Habil memberikan Rp 60 juta dalam pecahan Rp 100 ribu. “Pak Habil hanya bilang ‘Demi bangsa dan negara. Semangat!’,” ujar Iwan. Menurut dia, pertemuan dengan Habil tak sedikit pun menyinggung soal eksekusi sejumlah pejabat.

Tempo mengontak Habil melalui sejumlah nomor yang diberikan koleganya di PPP, tapi teleponnya tak aktif. Ia juga tak membalas pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Kuasa hukum Habil, Sugito Atmo Prawiro, menjelaskan duit yang diberikan kepada Iwan merupakan sumbangan Habil untuk menggelar diskusi bertema Pancasila dan antikomunisme. Sebelumnya, Iwan dan Habil bertemu dalam forum-forum antiPartai Komunis Indonesia. “Tak ada relevansi aktivitas Pak Habil dengan isu penembakan sejumlah pejabat,” kata Sugito. Menurut dia, Habil membantah jika disebut sebagai donatur pembelian senjata.

Pada awal Mei, Iwan dan Kivlan berjumpa lagi di rumah Iwan di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Iwan melapor bahwa senjata yang diminta sudah terkumpul. Alih-alih memuji kerja Iwan, Kivlan justru mendampratnya karena senjata tersebut tak sesuai dengan pesanan. “Pak Kivlan tak mau senjata rakitan,” ujar Iwan. Kivlan makin marah begitu tahu salah satu senapan ternyata rusak. “Kamu diberi perintah malah enggak becus,” tutur Iwan menirukan Kivlan. “Padahal targetnya masih ada dua lagi, Budi Gunawan dan Gories Mere,” Kivlan mengatakannya kepada Iwan.

Mendengar targetnya bertambah, Iwan mengaku nyalinya menjadi ciut. “Mendengar nama targetnya saja saya langsung sawan,” katanya. Menurut pengakuan Iwan, Kivlan mengincar Kepala



Badan Intelijen Negara Budi Gunawan serta Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere karena menganggap mereka sebagai penyebab polisi menangkapnya pada akhir 2016 atas tuduhan makar. “Tak ada kaitan sama sekali dengan kerusuhan 21-22 Mei,” ujar Iwan. Ia juga mengatakan tak pernah memetakan rumah pribadi para tokoh tersebut untuk kepentingan eksekusi sebagaimana klaim polisi.

Urung digunakan, senjata tersebut dibagikan Iwan kepada Tajudin dan Azwarmi. Tajudin mendapatkan dua senapan rakitan, laras panjang dan pendek, sedangkan Azwarmi memperoleh sepucuk Mayer. Iwan sendiri menyimpan revolver dari Asmaizul sebagaimana yang ditemukan polisi di mobilnya saat penang-kapan di Hotel Mega, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, pada 21 Mei lalu.

Pada hari itu, Iwan mengawal puluhan perempuan berdemonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum. Beres dari sana, Iwan berencana rehat di Hotel Mega. Baru meraih kunci kamar dan belum sempat beranjak dari lobi hotel, dia diringkus satu regu polisi berpakaian hitam dan menenteng senapan laras panjang. “Saya langsung diborgol dan disebut melanggar Undang-Undang Darurat tentang senjata api,” katanya. Di jok belakang mobil Isuzu D-Max bercat perak yang dikendarai Iwan, polisi menemukan pistol Taurus dan 89 butir peluru. Menurut Tajudin, setelah pembagian senjata, Iwan sempat ikut dia pulang kampung ke Sukabumi, Jawa Barat. Rencana pembunuhan empat pejabat telah membu-at nyali mereka berkerut. “Kami mencari tempat sembunyi biar tak dicari Pak Kivlan,” ujar Tajudin. Tinggal di sana sela-ma tiga pekan, Iwan memutuskan balik ke Jakarta karena ingin ikut berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu sebelum digulung pada hari itu juga di Hotel Mega. Tiga hari kemudian, giliran Tajudin ditangkap saat hendak naik ojek di kawasan Sentul, Bogor.

Kivlan Zen menyanggah berada di balik rencana eksekusi empat pejabat. “Saya tidak tahu,” kata Kivlan kepada kontributor Tempo, Irsyan Hasyim, di gedung Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri pada 29 Mei lalu. Pengacara Kivlan, Muhammad Yuntri, mengatakan kliennya memberikan uang kepada Iwan untuk menggelar demonstrasi memperingati Supersemar, yang jatuh setiap 11 Maret. Yuntri juga mengatakan Kivlan tak pernah memerintahkan siapa pun untuk menembak pejabat yang disebut Iwan. “Tak masuk akal bila Pak Kivlan berniat membunuh tokoh nasional.”

RAYMUNDUS RIKANG, STEFANUS PRAMONO



Kivlan Zen. TEMPO/M Taufan Rengganis

Kivlan Zen

Lulusan Akademi Militer 1971. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat.

Temuan polisi:

- Memerintahkan menembak mati empat tokoh nasional.
- Memberikan Sin\$ 1.500 kepada calon eksekutor untuk membeli senjata.
- Berpidato di “Rumah Rakyat” di Tebet, Jakarta, dengan mengucapkan “Kita akan merdeka” pada 5 Mei 2019.

Versi Kivlan:

- Tak ada perintah mengeksekusi pejabat.
- Duit diserahkan untuk menggelar demonstrasi dan diskusi peringatan Supersemar.
- Maksud pidato di “Rumah Rakyat” adalah merdeka untuk berbicara, bukan membentuk negara baru.

“Tak ada niatan untuk makar sama sekali.”

—Kivlan Zen, 15 Mei 2019

“Tak masuk akal bila Pak Kivlan berniat membunuh tokoh nasional.”

—Muhammad Yuntri, pengacara Kivlan, 7 Juni 2019

Petuah dari Purnawirawan

DIKAWAL 30 anggota pasukan bersenjata lengkap, Soenarko tiba Rumah Tahanan Militer Pomdam Jayakarta di Guntur, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei lalu, pukul satu dinihari. Satu setengah jam sebelumnya, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu selesai diperiksa di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap, Jakarta Timur, selama 14 jam lebih, atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal. “Diperiksa dari pukul sembilan pagi sampai setengah dua belas malam,” ujar kuasa hukum Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu, Jumat, 7 Juni lalu.

Sebelum Soenarko dibawa ke Guntur, kata Ferry, pada pukul 19.30 datang penyidik dari Markas Besar Kepolisian RI. Polisi menanyakan soal video Soenarko yang memerintahkan pengepungan kantor Komisi Pemilihan Umum dan Istana Negara pada 22 Mei, hari terakhir penetapan hasil pemilihan umum oleh KPU. Pada pukul 23.30, polisi mengeluarkan surat perintah penahanan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal.

Lima hari sebelumnya, senjata pesanan Soenarko dari Aceh dicegat aparat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten. Senjata itu dikirim Heriansyah, informan Soenarko saat menjabat Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda di Banda Aceh pada 2008. Polisi menengarai paket berisi sepucuk M4 Carbine, dua magasin, dan peredam itu akan digunakan untuk menyerang aparat dan pengunjuk rasa pada 22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta.

Setelah Soenarko ditangkap, sejumlah purnawirawan menggelar konferensi pers pada Jumat, 31 Mei lalu. Di antaranya mantan Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo; mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat; dan Kolonel Purnawirawan Sri Radjasa Chandra, anak buah Soenarko sewaktu di Aceh. Mereka menyatakan tuduhan penyelundupan senjata untuk melakukan makar itu mengada-ada. “Saya marah sekali Soenarko disangka makar,” kata Yayat. Menurut mereka, senjata yang disebut diselundupkan itu bukan M4, melainkan M16— sama-sama buatan Olympic Arms, pabrikan senjata Amerika Serikat. “Itu senjata busuk yang sudah dimodifikasi,” ujar Yayat. Senjata itu disebutkan akan dihibahkan untuk museum Kopassus. Pada hari yang sama dengan saat Yayat dan kawan-kawan menggelar konferensi pers untuk membela Soenarko, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah purnawirawan ke

Istana. Di antaranya Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia Letnan Jenderal Purnawirawan Rais Abin; mantan Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto; Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri, serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi. Selama satu setengah jam mereka membicarakan situasi keamanan nasional hingga penahanan Soenarko dan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen.

Menurut mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto, yang hadir dalam pertemuan itu, purnawirawan memberikan masukan kepada Jokowi untuk menegakkan aturan dalam kasus yang membelit dua pensiunan jenderal. Namun, kata Endriartono, “Kalau mereka dendam, tapi enggak melanggar hukum, ya tetap perlakukan dengan baik, dengan pendekatan persuasif.”

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang ada di situ, mengatakan tetamu juga meminta aparat mempertimbangkan faktor psikologis dalam menangani kasus purnawirawan. “Psikologi purnawirawan, TNI, Polri, masyarakat,” ujar Moeldoko. Apalagi pemerintah mensinyalir isu penahanan Soenarko dan Kivlan masih akan terus digaungkan seiring dengan bergulirnya sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.

DEVY ERNIS, PRAMONO, AHMAD FAIZ



# Aktor dan Panggungnya - majalah.tempo.co

[majalah.tempo.co](http://majalah.tempo.co)



Soenarko

Lulusan Akademi Militer 1978. Pernah menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Aceh, sebelum pensiun pada 2010.

## Temuan polisi:

- Mengirimkan senapan laras panjang, dua magasin, dan peredam senjata dari Aceh ke Jakarta.
- Memerintahkan mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum dan Istana Negara seperti dalam video yang beredar.

## Versi Soenarko:

- Tak pernah menyelundupkan senjata seri M4 Carbine atau M16A1.
- Senjata dikirimkan ke Jakarta untuk diperbaiki, lantas disimpan di Museum Kopassus.
- Rekaman perintah mengerahkan massa dibuat orang tak bertanggung jawab dan tanpa seizin Soenarko.

“Masak, makar membawa sajadah, kacamata, dan masker?”

— Soenarko, 18 Mei 2019

“Beritanya digoreng seolah-olah Pak Soenarko menyelundupkan senjata untuk 22 Mei, padahal itu enggak benar.”

—Zaenal Abidin, pengacara Soenarko, 31 Mei 2019



Habil Marati. TEMPO/Imam Sukamto

Habil Marati

Politikus Partai Persatuan Pembangunan. Calon legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum 2019.

Temuan:

1. Memberikan uang Rp 60 juta kepada calon eksekutor empat pejabat.
2. Berpesan “Demi bangsa dan negara. Semangat!” kepada calon eksekutor.

“Tak ada relevansi aktivitas Pak Habil dengan isu penembakan sejumlah pejabat.”

—Sugito Atmo Prawiro, pengacara Habil, 7 Juni 2019



Asmaizul alias Fi . aliansiindonesia.id

Asmaizul alias Fi

Ketua Umum Gerakan Emak-emak Peduli Rakyat.

Temuan polisi:

1. Senjata revolver Taurus milik suaminya ditemukan di mobil calon eksekutor pejabat.
2. Menerima duit Rp 50 juta dari calon eksekutor.

“Ibu sama sekali tak tahu soal rencana pembunuhan tokoh nasional.”

—Bayu Putra Her anto, anak Asmaizul , 3 Juni 2019



Fauka Noor Farid. medanheadlines.com

Fauka Noor Farid

Lulusan Akademi Militer 1992. Anggota Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998. Pensiun dini dari dinas militer dengan pangkat letnan kolonel.

Temuan:

1. Diduga berkoordinasi dengan koleganya saat kerusuhan 22 Mei dan menyatakan bagus bila ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
2. Ditengarai hadir dalam sejumlah rapat perencanaan unjuk rasa.

Versi Fauka:

3. Posisinya jauh dari gedung Bawaslu ketika kerusuhan pecah dan menghendaki tak ada korban dalam aksi sebagaimana instruksi Prabowo Subianto.
4. Tak ada rapat perencanaan dan tak pernah ikut dalam diskusi yang membahas persiapan unjuk rasa yang berakhir kisruh di kantor Bawaslu.
- 5.

“Lucu kalau nama saya muncul sebagai dalang kerusuhan.”

—Fauka Noor Farid, 1 Juni 2019



Iwan Kurniawan

Berdinas sebagai prajurit sejak 1990. Desersi pada 2005.

Temuan polisi:

- 1.Menerima perintah dari Kivlan Zen untuk membunuh empat pejabat.
- 2.Menerima Sin\$ 1.500 dari Kivlan.
- 3.Menerima Rp 60 juta dari Habil Marati.
- 4.Membeli tiga pucuk senjata dan menyimpan sepucuk revolver Taurus yang digadaikan Asmaizul .

“Mendengar nama targetnya saja saya langsung sawan.”

—Iwan Kurniawan, 28 Mei 2019

SUMBER: [WAWANCARA, TEMPO.CO](#)

# Lesing Peluru Dalam Gelap - majalah.tempo.co

[majalah.tempo.co](http://majalah.tempo.co)



DUA pekan berlalu, peluru itu masih terasa berdesing di telinga MR. Pada Rabu dinihari, 22 Mei lalu, di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, peluru tersebut nyaris mengenai kuping kanannya. Ia selamat, tapi Muhammad Reyhan Fajari, kawannya yang berada di sebelahnya, roboh oleh peluru itu dengan pelipis kiri bolong.

“Waktu itu gelap. Lampu mati. Saya cuma mendengar suara peluru melewati kuping saya,” ujar MR menceritakan kembali peristiwa tersebut pada Selasa, 4 Juni lalu.

Seusai salat tarawih pada Selasa malam, 21 Mei lalu, remaja pria 17 tahun itu tak langsung pulang. Ia ikut membersihkan Masjid Al-Istiqomah di Jalan Petamburan V seperti remaja lain. Ibunda Reyhan, Nur Hayati, mengatakan anak laki-laknya yang berumur 16 tahun itu pun pamit dari rumah mereka, yang juga terletak di Petamburan V, ke Al-Istiqomah. “Dia mau bersih-bersih masjid,” ujar perempuan 40 tahun ini.

Rupanya, kegiatan di masjid malam itu berlanjut. MR dan teman-temannya meriung untuk mengikuti rapat organisasi mereka, Generasi Muda Masjid Al-Istiqomah, hingga larut malam guna membahas kegiatan selama Ramadan. Sekitar pukul 02.00, MR mendengar keributan. “Katanya ada kabar kalau kampung kami diserang,” ujar MR. Bersama lima temannya, termasuk Reyhan, ia berjalan menuju sumber keributan, yang berjarak sekitar 100 meter dari Al-Istiqomah.

Setiba di lokasi pukul dua lewat, MR melihat orang sudah berkumpul di depan Asrama Brimob Polri yang berada di Jalan K.S. Tubun, juga di kawasan Petamburan. Bukannya menjauh dari lokasi, kelompok remaja tersebut malah mendekati asrama. Posisi mereka berada di ujung Jalan Petamburan IV, di samping kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, yang berseberangan dengan Asrama Brimob.

Saat itu, lampu jalan tak menyala. Sekitar pukul 02.30, MR mendengar suara tembakan beberapa kali. “Enggak tahu dari mana arahnya karena enggak kelihatan. Tahunya Reyhan yang kena,” ujarnya.

Sebelum kericuhan meletus, pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menggelar unjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jalan M.H. Thamrin pada Selasa pe-tang, 21 Mei, untuk memprotes dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden. Sekitar pukul 21.00, massa membubarkan diri. Tapi massa, yang menurut polisi kelompok yang berbeda, kembali datang ke Bawaslu sekitar pukul 23.00 dan mulai mengacau. Mereka melempari polisi dengan batu dan bom molotov.

Polisi kemudian mendorong massa hingga ke Tanah Abang, kawasan di belakang gedung Bawaslu. Kericuhan kemudian merembet ke depan Asrama Brimob di Petamburan dan memancing MR, Reyhan, dan kawan-kawannya menonton setelah mendengar isu kampung mereka diserang.

Pada waktu yang hampir bersamaan, polisi dari satuan Gegana yang berada di Asrama Brimob berusaha menghalau perusuh yang melempari wisma dengan batu dan bom molotov. Perusuh juga membakar sejumlah mobil penghuni asrama. Komandan Subdetasemen Kimia Biologi dan Radio Aktif Gegana Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Ibrahim Joao Sadjab, yang saat itu berada di lokasi, mengatakan polisi tak menggunakan peluru tajam untuk meredam amuk massa. “Kami ganti pakai peluru karet,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, sesuai dengan tugasnya, personel Gegana memang dibekali peluru tajam. Salah seorang anggota Gegana yang ikut menghalau massa pada kericuhan tersebut menunjukkan peluru tajam dalam senjata di pinggangnya kepada Tempo pada Selasa, 4 Juni lalu. Hanya, kata dia, ketika kerusuhan terjadi, semua personel yang berjaga diinstruksikan mengganti peluru tajam dengan peluru karet. “Kami berusaha bertahan dengan amunisi seadanya, dengan personel yang juga terbatas,” ujar Ibrahim.

Setelah rebah oleh peluru, Reyhan sempat diboyong ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Mintohardjo di Bendungan Hi-lir, Jakarta Pusat. Ia dinyatakan tewas setiba di sana. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk diautopsi.

Adanya lubang bekas peluru tajam di pelipis Reyhan diketahui dari penelusuran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut Komnas HAM, Reyhan satu dari delapan korban tewas dalam kerusuhan 22 Mei. Dari delapan korban, empat di antaranya telah diautopsi di Rumah Sakit Polri. Kepala Operasional Rumah Sakit Polri Komisaris Besar Edy Purnomo mengatakan, dari empat korban, peluru hanya ditemukan pada satu jenazah. “Seingat saya, dari hasil roentgen, peluru itu bersarang di sekitar tulang punggung,” ujar Edy. Peluru itu, kata Edy, sedang diuji balistik oleh polisi.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan peluru tersebut bersarang di tubuh Harun Rasyid, remaja 15 tahun. “Ia terkena tembakan di lengan kiri atas menembus ke dada,” ujar Beka. Komnas HAM masih menginvestigasi asal peluru tersebut. Didin Wahyudin, ayah Harun, berharap kematian anaknya diusut tuntas. “Saya ingin keadilan untuk anak saya,” ujarnya.

Menurut Didin, anaknya ditemukan tewas di jembatan Kemanggisan, yang melintang di kawasan Slipi, Jakarta Barat, pada 22 Mei lalu oleh relawan medis. Didin mengatakan Harun tak pulang ke

rumah setelah meminta uang Rp 5.000 untuk membeli layangan sehari sebelumnya. Harun memang kerap menginap di rumah sahabatnya.

Didin menyesalkan sikap polisi yang terkesan tertutup. Ia mengaku tak mengetahui hasil autopsi forensik terhadap anak laki-lakinya. Didin mempersoalkan salah satu pasal dalam surat persetujuan autopsi forensik. Dalam surat itu, menurut dia, tertulis bahwa keluarga tak dapat menuntut hasil autopsi. "Terkesan ada yang ditutupi," ujarnya.

Menurut Edy Purnomo dari Rumah Sakit Polri, hasil autopsi forensik memang tak bisa diperoleh keluarga. Sebab, autopsi itu diajukan polisi untuk kepentingan penyelidikan, yang disetujui keluarga melalui surat pernyataan. "Aturannya memang begitu," katanya.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan tak ada yang ditutupi dalam pengungkapan tewasnya delapan orang dalam kerusuhan 22 Mei. Menurut Tito, tim investigasi yang dibentuk Polri sedang merunut peristiwa tersebut. "Hasil investigasi ini sudah pada proses mempelajari kronologi peristiwa," ujarnya. Ia mengatakan tim itu diawasi Komisi Kepolisian Nasional dan akan bekerja sama dengan Ombudsman RI agar prosesnya transparan.

DEVY ERNIS, AJI NUGROHO